

Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Keuangan Negara

Ahmad Baehaki¹, M Da'I Al Mutawali² Oswald Navaro Sitio³

oswaldsitio@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dosen Pembimbing: Ahmad Rayhan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Many countries have carried out the event of moving the national capital for various reasons. The urgency of moving the National Capital sees Jokowi's long plan and fast movement to move IKN, namely to face future challenges. The purpose of this paper is to explain the impact that the move of the country's capital will have on state finances and the country's economy. This research uses a type of causal research which aims to determine cause and effect relationships between certain variables. This research uses a mixed approach that combines descriptive data and numbers to be analyzed. Data sources are secondary data, literature data, official state document data, and social media data. This research uses qualitative analysis methods, analyzing the collected documents. In the end, moving the capital city will have positive and negative impacts, namely an increase in inflation rates and economic growth.

Keyword: *Ekonomi, Inflasi, Perpindahan, Pertumbuhan*

ABSTRAK

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN, yaitu untuk menghadapi tantangan masa depan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memamparkan dampak yang didapatkan dari perpindahan ibu kota negara terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab dan akibat antara variable-variabel tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan data bersifat deskriptif dan angka yang akan dianalisis. Sumber data yaitu data sekunder, data literatur, data dokumen resmi negara, dan data sosial media. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menganalisis dokumen yang dikumpulkan. Pada akhirnya perpindahan ibu kota ini akan membawa dampak positif dan negatif yaitu adanya kenaikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Displacement, Economy, Growth, Inflation,*

Pendahuluan

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak sudah dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam dan hasilnya beragam ada yang menjadi lebih baik dan menumbuhkan perekonomian. Beberapa diantaranya pertama, Brazil, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun nama Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nanjing yang tersaingi oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya dinasti atau budaya, Ibu Kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor sehingga menenggelamkan citra ibukota sebelumnya seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia (Mazda, 2022).

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara melihat rencana panjang dan gerak cepat Presiden Jokowi untuk memindahkan IKN sebagai gebrakan untuk memajukan negara di bidang ekonomi dan pemeratakan Pembangunan agar tidak Jawa sentris, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN, yaitu untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap* menjadi negara yang di perhitungkan di kancah dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan dalam ekonomi sebagai salahsatu cara untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan SDA, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. (Nainggolan, 2022). Oleh karena itu mungkin pemindahan ibu kota ini dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara, IKN yang dapat mendukung dan mendorong perubahan di bidang ekonomi untuk menuju indonesia maju.

Di sisi lain, pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa mempunyai beberapa risiko. Hal ini bersangkutan dengan persiapan di daerah tujuan dalam hal infrastruktur yang diperlukan untuk membantu pengendalian pemerintahan. Pemindahan pusat pemerintahan (ibu kota) sendiri merupakan upaya untuk memindahkan atau menciptakan suatu ruang atau kawasan baru sebagai bagian dari pusat pemerintahan untuk mengalihkan ruang atau kawasan sebelumnya. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan suatu keputusan yang penting karena memerlukan persiapan kelembagaan, sosial, dan modal yang tidak sedikit. Dari sisi pembiayaan, meski pemerintah mengatakan APBN akan memenuhi 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp 446 triliun, namun tetap terjadi risiko yang menambah beban APBN jika terjadi kegagalan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. (Rahmayani & Wahidah, 2024).

Dalam pembangunan maupun pemindahan ibu kota negara membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan. Upaya untuk memutus rantai penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan merealisasikan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan yaitu setidaknya diperlukan adanya suatu undang-undang sebagai pelaksanaan ketentuan pokok yang diatur dalam UUD 1945 dan asas-asas umum yang diberlakukan secara universal. Pengaturan mengenai keuangan negara tersebut telah diatur dalam 3 (tiga) paket Undang-Undang reformasi keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004).

Keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki negara dan dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, penyusunan anggaran, pengenaan dan pemungutan pajak, dan termasuk penggunaan sumber penerimaan pemerintah. (Anastasius, 2023).

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dijadikan pembahasan nantinya yaitu mengenai:

1. Bagaimana pengaruh perpindahan Ibu Kota Negara terhadap keuangan negara?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan maupun peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan data bersifat deskriptif dan angka yang akan dianalisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti data statistik, laporan pemerintah. Kemudian, sumber data literatur yang berisi informasi mengenai topik penelitian seperti buku, jurnal ilmiah. Lalu, sumber data dari dokumen resmi lembaga pemerintah, dokumen resmi dari pihak pemerintah yang berisi data dan informasi berkaitan dengan topik penelitian seperti laporan keuangan, kebijakan resmi. Dan, sumber data media sosial, data yang dikumpulkan dari media sosial yang memiliki relevansi dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menganalisis dokumen yang dikumpulkan.

Hasil dan pembahasan

1.1 Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Keuangan Negara

Pemindahan ibu kota negara memiliki beberapa alasan yang menjadi faktor pendorongnya. Menurut kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kesenjangan yang terjadi pada daerah secara keseluruhan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pemerataan ekonomi ini akan berdampak pada pemulihan ekonomi pada daerah yang tidak terjangkau. Dengan adanya rancangan pemindahan diharapkan dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi dan dapat mengurangi kesenjangan antar pulau yang ada di Indonesia

Pemerintah bertujuan untuk pemerataan ekonomi secara luas sehingga bagian pemulihan beberapa ekonomi di wilayah Indonesia bisa terselesaikan. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di pulau Jawa khususnya DKI Jakarta tentu sangat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia yang mengakibatkan ekonomi Indonesia jalan di tempat. Kawasan-kawasan di negara Indonesia tentu memiliki sebuah karakter dalam pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia.

Pemerataan ekonomi sebagai bagian untuk memulihkan ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah sehingga perpindahan ibu Kota negara sebagai daya tarik wilayah timur dalam memajukan kawasan industri untuk pertumbuhan ekonomi di daerah terutama daerah yang sulit di jangkau. Adanya kesenjangan daerah akan menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional sehingga pemerintah diharapkan mampu melakukan pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan terutama pada faktor ekonomi. Faktor perpindahan penduduk yang tidak merata serta peningkatan ekonomi yang hanya Jawa sentris akan berdampak pada kesenjangan di berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak dapat diperbaiki (Pribadi & Utomo, n.d.).

Terdapat sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa namun di lain pihak sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Jumlah penduduk di pulau Jawa yang sangat padat tentu menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa tentu memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi beban ekologis di Kota Jakarta. (Pribadi & Utomo, n.d.-a).

Dalam sudut pandang aspek geografi pemindahan ibu kota negara sangat penting karena, wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam. Secara geologis Pulau Kalimantan relatif stabil dan terjaga dari gempa bumi vulkanik maupun tektonik. Hal ini dikarenakan wilayah Kalimantan tidak berpotongan dengan kerak bumi sehingga tidak terdapat rangkaian gunung berapi. Sedangkan dalam sudut pandang sosial dan politik, pemindahan ibu kota menjadi kesempatan bagi wilayah Indonesia timur dalam pemerataan pembangunan. Hal ini dapat menjadi strategi guna meredakan isu ketidakadilan dalam pembangunan dan distribusi energi yang dialami wilayah Indonesia timur.

Pemindahan ibu kota negara mempunyai sejumlah risiko, salah satunya adalah risiko finansial. Berdasarkan desain IKN, Bappenas menetapkan ada dua kemungkinan total kebutuhan dana: Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Peran pemerintah dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan akan sangat menentukan skenario kebutuhan finansial (Bappenas, 26 Juni 2019). Pembelian lahan, pengembangan fungsi penunjang, dan pengembangan fungsi primer merupakan beberapa persyaratan pembiayaan. skenario kebutuhan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Kebutuhan Pembiayaan dari Pembangunan IKN Baru

No	Kebutuhan Infrastruktur	Skenario I (Rp triliun)	Skenario II (Rp triliun)
1	Fungsi Utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif	32,7	20
2	Fungsi Pendukung: Gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan	265,1	182,2
3	Fungsi Penunjang: fasilitas sarana dan prasarana	160,2	114,8
4	Kebutuhan Pengadaan Lahan	8	6
Total		466	323

Sumber: Bappenas, 2019

Infrastruktur dalam skala besar diperlukan untuk proyek pembangunan “ibu kota baru”. Proyek infrastruktur diketahui mempunyai risiko jangka panjang, terutama jika menyangkut kinerja proyek yang mungkin tidak memenuhi harapan. Namun, sektor swasta tentu mengantisipasi bahwa pendapatan akan dicapai sesuai dengan prediksi awal proyek. Pemerintah perlu sangat memperhatikan perjanjian kerja sama dengan dunia usaha dan swasta untuk memastikan infrastruktur baru dan IKN memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah dan tidak semakin membebani APBN.

Sebaliknya, Persatuan Pengusaha *Real Estate* Indonesia (REI) memproyeksikan kenaikan inflasi akan lebih besar dari perkiraan Bappenas dari sudut pandang makroekonomi. Mengingat sebagian besar masyarakat menguasai sebagian besar tanah, REI memperkirakan kenaikan harga tanah akan menjadi penyebab utama inflasi (Faisal Yuniyanto, 2019).

Kemungkinan kenaikan nilai tanah yang tidak terkendali juga dapat diperburuk dengan adanya spekulasi. Untuk memperkirakan hal ini, pemerintah perlu merancang lokasi dan penataan ruang kawasan dengan baik, serta membeli barang-barang yang semaksimal mungkin berasal dari wilayah yang dikuasai negara atau BUMN. Sistem pemanfaatan aset yang tidak membebani anggaran negara dapat diterapkan untuk memanfaatkan properti ini. Dengan demikian

risiko tingginya inflasi yang berasal dari kenaikan harga lahan dapat diminimalisir.

Menurut *Institute for Development of Economic and Finance* atau Indef menemukan berbagai dampak negatif dari rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan. Temuan ini berasal dari riset simulasi yang dilakukan oleh Indef menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (*Computable General Equilibrium*). "Pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan PDB riil dan GNE (*Gross National Expenditure*) riilnya," kata peneliti Indef, Rizal Taufikurahman. (Ria et al., n.d.)

Pada scenario pertama yaitu Kalimantan Tengah, menurut riset Indef menemukan bahwa pemindahan ibu kota negara dapat berdampak 1,77% terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001%

Dalam skenario pertama yaitu Kalimantan Tengah. Riset Indef menemukan pemindahan ibu kota ke provinsi ini berdampak 1,77 persen terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001 persen. Pada scenario kedua, Kalimantan Timur, jika dipindahkan ke Kalimantan Timur dampaknya pada PDB Nasional hanya 0% artinya tidak ada sama sekali. Sementara, dampak PDRB Kalimantan Timur meningkat 0,24%. (Ria et al., n.d.)

Dalam aspek ekonomi, pemindahan ibu kota negara akan menimbulkan sistem ekonomi yang baru dan baik di wilayah Kalimantan dan daerah timur sehingga dapat terciptanya pemerataan ekonomi yang luas. Pemulihan ekonomi di masing-masing wilayah akan mengalami perubahan kearah yang maju pasca pemindahan ibu kota negara. Selain itu, dampak pemindahan ibu kota negara bagi masyarakat Kalimantan berhubungan dengan adanya ketersediaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Tidak hanya wilayah Kalimantan saja yang berdampak, wilayah bagian timur akan berdampak juga dengan terjangkaunya ibu kota negara. (Priadi & Utomo, n.d.-b)

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibu Kota Negara

Menurut analisis Bappenas, pengalihan IKN akan meningkatkan perekonomian negara, dengan perkiraan peningkatan PDRB sebesar 0,1%. Menurut Bappenas, eksploitasi sumber daya potensial, seperti pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur produktif dan penciptaan lapangan kerja bagi pekerja terampil yang belum dipekerjakan, menjadi penyebab tumbuhnya PDRB. Secara khusus, Bappenas memperkirakan bahwa biaya tenaga kerja akan meningkat sebesar 1,37%, yang akan tercermin pada kenaikan gaji tenaga kerja di wilayah sekitarnya (Ayu Lestari Wahyu Puranidhi, 2019)

Namun rencana relokasi IKN juga akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Menurut perkiraan Bambang Brodjonegoro, prosedur pengalihan

IKN akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,2%. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan inflasi meningkat, yang selalu diikuti dengan peningkatan biaya-biaya kebutuhan pokok. Namun karena kenaikan harga hanya terbatas pada fasilitas IKN baru dan sekitarnya, inflasi diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap daya beli negara (Ayu Lestari Wahyu Puranidhi, 2019).

Bappenas bermaksud memberikan insentif bagi pelaku korporasi untuk berinvestasi guna menjamin berkembangnya IKN baru. Menurut Bambang Brodjonegoro, perluasan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia akan berdampak pada peningkatan arus perdagangan secara nasional sebesar 50% (Faisal Yuniarto, 2019) Kebijakan yang bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri harus diutamakan bersamaan dengan gerakan untuk meningkatkan pangsa perdagangan dan investasi. Pekerjaan akan tercipta dengan cara ini, meningkatkan PDB lokal dan memungkinkan individu memperoleh lebih banyak uang. (Silalahi, 2019).

Pengalihan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang stabil dengan kombinasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, lokasi IKN yang baru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan dapat memperkecil kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan wilayah lain di dunia.

Efek dari pemindahan ibu kota negara dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok atau wilayah. Dengan dilakukannya pemindahan ibu kota negara, dapat menyebabkan perekonomian lebih padat karya, sehingga dapat membantu menurunkan angka kesenjangan antar kelompok atau wilayah. Terjadinya perekonomian yang lebih padat karya dapat menurunkan kesenjangan pendapatan tersebut dengan kenaikan harga modal sebesar 0,23% dan kenaikan harga tenaga kerja sebesar 1,37%.

Penutup

Kunci utama keberhasilan pemindahan ibu kota negara terletak pada pemimpin Pemerintahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain mempertimbangkan berbagai aspek tentu diperlukan persetujuan oleh sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

Proyek pemindahan ibu kota negara membutuhkan pembiayaan yang besar, dengan dua skenario kebutuhan total pembiayaan yang signifikan, yaitu sebesar Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Kebutuhan pembiayaan meliputi berbagai infrastruktur, seperti gedung-gedung utama, fasilitas pendukung, penunjang, dan pengadaan lahan. Karakteristik proyek infrastruktur adalah memiliki risiko jangka panjang, terutama berkaitan dengan kinerja proyek yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk mengelola risiko ini, prinsip pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta harus diperhatikan dengan baik dalam perjanjian kerja sama.

Terdapat potensi kenaikan inflasi yang signifikan, terutama terkait dengan kenaikan harga lahan. Spekulasi dan kontrol terhadap harga lahan dapat menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi. Namun, dengan perencanaan lokasi dan tata ruang wilayah yang tepat, serta pengadaan lahan dari aset negara atau BUMN, risiko tingginya inflasi dapat diminimalisir. Meskipun ada risiko terkait inflasi, pemindahan ibu kota negara diprediksi akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, peningkatan arus perdagangan, dan prioritas hilirisasi industri, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dengan demikian, sementara pemindahan ibu kota negara membawa risiko tertentu terkait pembiayaan dan inflasi, ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang efektif dalam melaksanakan proyek ini.

Daftar Pustaka

- Anastasiyus, Y. (2023). *Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Ayu Lestari Wahyu Puranidhi. (2019, June 26). *Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Inflasi 0,2 Persen*. Liputan6.Com.
- Faisal Yuniyanto. (2019, July 19). *Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diyakini tingkatan arus perdagangan*. Antarnews.Com.
- Mazda, C. N. (2022). ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY. In *Jurnal Enersia Publika* (Vol. 6, Issue 1).
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (n.d.-a). *Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha* (Vol. 02).
- Rahmayani, A., & Wahidah, Z. (2024). DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM ASPEK GEOGRAFI, SOSIAL POLITIK, DAN EKONOMI. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10.
- Ria, R., Hasibuan, A., & Aisa, S. (n.d.). *Reni Dan Aisa: Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota 183 DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA*.
- Silalahi, S. (2019). *DAMPAK EKONOMI DAN RESIKO PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA*. 11(16).
- Nainggolan, E. U. (2022, 1 25). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Retrieved from [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id):
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>